

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam setiap pemerintahan baik pemerintahan pusat ataupun daerah. Perwujudan tata kelola yang baik salah satunya adalah pemerintah memiliki kualitas laporan keuangan yang baik dalam pengelolaannya. Penelitian sama dilakukan oleh (Maysaroh 2018), yang menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Modo, Saerang, and Poputra 2016).

Menurut (Sukmaningrum 2012) laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Suatu informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang disusun oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Ihsanti 2014). Menurut (Wati, Herawati, and Sinarwati 2014) Dalam hal ini adanya Kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Teknologi Informasi (STI). Dengan menggunakan STI laporan keuangan dapat menjadi lebih berkualitas karena data telah tersrtuktur oleh sistem. (Hall,

2009) Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah kemajuan teknologi pada saat ini, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. (Modo, Saerang, and Poputra 2016). Agar tercipta kinerja pemerintah yang baik, dilakukan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah.

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. (Dewi, Purnamawati, and Herawati 2017). Penelitian sama dilakukan oleh (Untary and Ardiyanto 2015) Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai

sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan SPI mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga perlu dilakukan untuk laporan keuangan menjadi berkualitas. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penelitian (Adhi and Suhardjo 2013) menyebutkan bahwa penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Jum'at (21/05/2021) SEMARANG-Pemerintah Kabupaten Jepara kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Pencapaian tersebut merupakan kali kesebelas yang didapat Kota Ukir secara berturut-turut. Bupati Jepara Dian Kratiandi bersyukur sekaligus bangga dengan raihan WTP selama sebelas kali berturut-turut. Dia berharap, capaian tersebut bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan, agar kualitas penyelenggaraan keuangan di Kabupaten Jepara bisa lebih baik lagi "Alhamdulillah ini merupakan hadiah bagi masyarakat Jepara Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berusaha keras sehingga terwujudnya pencapaian ini," ujar bupati saat menerima piagam opini WTP otos LKPD 2020, di Kantor Perwakilan BPKP Jateng. (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kabupaten-jepara-raih-opini-wtp-kesebelas/>)

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah tersebut dapat memperoleh penghargaan opini WTP atas LKPD-nya.

Penelitian ini mengembangkan variabel yang ada pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurillah (2014), Wati et al (2014) dan Ramadhani (2018). Perbedaan penelitian ini dengan terletak pada penambahan variabel independen dan obyek penelitian. Berdasarkan penelitian Wati et al (2014) peneliti menambahkan variabel SPI dan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Nurillah, 2014, Ramadhani, 2018). Penambahan variabel ini karena laporan yang baik tentunya menerapkan SAP. Hal ini

didukung pada penelitian Wati et al (2014) yang menyebutkan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Obyek penelitian ini adalah karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Pemilihan obyek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah karena opini audit wajar tanpa pengecualian yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah mencapai yang ke-11 kalinya. Kabupaten Jepara mempunyai julukan Kota Ukir, dimana hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup signifikan sehingga pengelolaan laporan keuangan daerahnya harus dilakukan dengan akuntabel. Pelaporan ini telah dilakukan oleh Kabupaten Jepara dengan sangat baik sehingga dapat menjadi daerah percontohan bagi pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti memberi penelitian ini judul: **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

2. Apakah Sistem Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk beberapa pihak antara lain :

1. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat konsistensi hasil penelitian sehingga bermanfaat sebagai bahan perbandingan hasil-hasil penelitian sejenis.
2. Bagi Pemerintahan, peneliti berharap hasil penelitian bisa dijadikan pertimbangan khususnya untuk pemda agar melakukan peningkatan terkait

kualitas LKPD demi tercapainya LK yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

3. Bagi Institusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode penelitian

Menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi pengukuran variabel, dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.